



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM
PELAKSANA EITI**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,
Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta Pusat

Agenda : 1. Pembahasan Persiapan Validasi EITI
2. Pembahasan Draft Final Laporan Commodity Trading
3. Pembahasan Scoping Study Laporan EITI 2016

Peserta Rapat
Instansi Pemerintah : 1. Kemenko Perekonomian Kedeputian III: Bastian H, Nurwachid
P, Agus Haryanto, Marentyas, Rosiana K, Mujab,
Prasetyaningtyas
2. Kemenko Perekonomian, Kedeputian I: Andi
3. Kemendagri : Elsa, Dinda
4. Ditjen Minerba ESDM: Wezi Ferlian, Dini A, Azarie
5. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adjanto, Sigit Harjanto,
Mursyid H
6. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Robby Martaputra, Seprina
Hasan
7. SKK Migas: Runi N, Musfadilah D, Gestariani, M Anas

Asosiasi Industri dan
Perusahaan : APBI-ICMA : Hendra Sinadia, Marvin G
Pertamina : Ahlif Kasim

Perwakilan Masyarakat Sipil : PWYP dan koalisi: Aryanto Nugroho, Asri Nuraeni, Emy Ardhyanti

Sekretariat EITI :Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga,
Andrian, Anggi Gartika, Arief

A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat. Bpk Bastian mempersilahkan Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma untuk menyampaikan agenda rapat.

B. PEMBAHASAN

1. Pembahasan Persiapan Validasi EITI

- Paparan disampaikan oleh Bpk Edi Tedjakusuma (*Team Leader* Sekretariat EITI).
- Proses Validasi adalah kegiatan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam pelaksanaan EITI *Requirements*. Untuk itu dilakukan penilaian terhadap progres capaian suatu negara dari masing2 *requirements* dan kemudian ditetapkan *overall assessment* untuk menentukan status *compliance*
- Setiap negara pelaksana EITI harus memulai proses validasi dalam jangka waktu 2,5 tahun sejak mendapatkan status *Candidate EITI country*, dan satu negara yang sudah berstatus *compliance* harus mengikuti proses validasi ulang (*re-validated*) setiap 3 tahun. Di tahun 2018 (mulai bulan September), Indonesia akan menjalani validasi yang kedua setelah validasi yang pertama dilakukan di tahun 2013.
- Tujuan Validasi: Untuk menilai kinerja, mempromosikan dialog dan pembelajaran di negara-negara anggota EITI dan untuk menjaga integritas EITI dengan pelaksanaan standar global yang sama pada negara-negara pelaksana EITI.
- Prosedur validasi dibagi menjadi empat tahapan yaitu persiapan validasi, pengumpulan data dan konsultasi/wawancara, review oleh validator independen, dan review oleh Dewan EITI. Persiapan validasi dilakukan dengan pengumpulan seluruh dokumen yang diperlukan dan penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Tim Pelaksana EITI terhadap kepatuhan pada standar EITI. Pada tahap pengumpulan data dan konsultasi, Sekretariat EITI Internasional akan memeriksa sejumlah dokumen dan melakukan wawancara dengan sejumlah pihak. Sekretariat EITI Internasional akan menyusun laporan evaluasi awal mengenai perkembangan pelaksanaan standar EITI sebelum laporan disampaikan kepada validator. Tim Pelaksana EITI diberikan kesempatan untuk memberi masukan pada laporan yang akan disampaikan kepada validator. Tahap selanjutnya yaitu review laporan awal Sekretariat EITI Internasional yang dilaksanakan oleh validator independen. Validator menyiapkan laporan berupa penilaian terhadap masing-masing ketentuan untuk disampaikan kepada Dewan EITI. Tahap terakhir yaitu Komite Validasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan EITI mengenai kepatuhan suatu negara dalam pelaksanaan Standar EITI. Dewan EITI akan membuat ketentuan akhir apakah pelaksanaan transparansi suatu negara sudah memenuhi Standar EITI atau belum.
- Selengkapnya dapat dilihat di bahan presentasi

Tanggapan:

- Bpk Bastian: Bagaimana menyiapkand dokumen agar diterima EITI Internasional, jangan sampai sudah disepakati oleh Tim Pelaksana namun nanti tidak diterima. Sekretariat EITI harus mencari apa saja yang harus disiapkan. Untuk workshop dari EITI Internasional boleh-boleh saja dan kita harus mengambil manfaat dari kegiatan itu.
- Bpk Adijanto (Ditjen Perben): Untuk persiapan validasi, dilihat dari kolom-kolom di presentasi, maka hal tersebut diisi oleh anggota Tim Pelaksana, jadi ditentukan juga siapa yang harus mengerjakan. Hal itu untuk membantu Sekretariat EITI juga jadi tinggal memonitor. Nanti saat workshop seharusnya sudah tahu tugas masing-masing. Untuk IA lebih baik dijelaskan di kontrak untuk terus mengawal kegiatan, termasuk validasi.
- Bpk Aryanto (CSO) Yang paling penting penyiapan dokumen karena banyak dokumen lama yang harus mendapat persetujuan Tim Pelaksana seperti TOR yang sudah sejak ttahun 2012. Dasar

hukumnya apa Perpres 26/2010 yang seharusnya sudah direvisi. Keputusan perwakilan daerah yang harus diupdate. SK berlaku 3 tahun, sebaiknya perwakilan yang sekarang sudah diganti. Hal tersebut perlu disiapkan, misalkan SK.

- Pak Bastian: Bagaimana status regulasi, Perpres atau SK Menko?
- Pak Ronald (Sekretariat EITI): Sebenarnya mau revisi, namun banyak pendapat yang mendorong untuk perubahan Perpres (Perpres baru). Kalau Perpres baru takutnya malah tak terbit. Sehingga kesepakatan terakhir revisi saja. Draftnya sudah disiapkan dan nanti akan dibahas di Tim Pelaksana. TOR sudah ada, sampai saat ini masih kita gunakan, karena belum ada urgensi untuk perubahan sampai adanya standar baru. Draft revisi TOR sudah disiapkan, nanti akan dirapatkan. EITI diatur dalam Permenko, struktur organisasinya masih tetap. Keterwakilan daerah, sebenarnya pernah diajukan beberapa tahun lalu (ditandatangani Sesmenko) namun masih belum direspon.
- Pak Bastian: Kalau misalkan regulasi (Perpres/Permenko) belum selesai sampai September, lalu apa yang perlu disiapkan agar tak ada masalah.
- Pak Edi: Kita udah bahas Perpres, jadi revisi saja. Jadi harus ketemu ke biro hukum, kalau sudah setuju, nanti ke Tim Pelaksana. Bagaimana kalau kita membuat Permenko sebagai turunan Perpres karena lebih mudah, sedangkan revisi Perpres tetap jalan. Untuk IA tetap akan dilibatkan.
- Pak Bastian: Antisipasi apabila revisi Perpres belum selesai. Jadi harus segera disiapkan koordinasi dengan biro hukum dll. Saya belum bisa memutuskan revisi atau Perpres baru, nanti biar rapat yang memutuskan.
- Ibu Elsa (Kemendagri): Kita belum tau SK yang akan diperbaharui, nanti kita akan cek. Dan apabila ada data yang diperlukan bisa kontak kami.
- Bpk Aryanto: Lebih baik ada transfer informasi atau koordinasi dari peserta rapat agar yang lain mengetahui.
- Bpk Bastian: Itulah kelemahan kita, yaitu koordinasi
- Bpk Edi: Biasa yang hadir adalah Bpk Sofyan, nanti kalau ada Sekretariat EITI Internasional akan hadir, nanti akan dibrief dulu.
- Bpk Bastian: Mohon ditindaklanjuti

2. Pembahasan Draft Final Transparansi Commodity Trading

- Pak Bastian: Kita belum mendapatkan data dari Pertamina. Kemudian bulan ini ada workshop atau pertemuan tentang Commodity Trading di Paris, Perancis. Harusnya Kemenko Perekonomian diundang karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan transparansi Commodity Trading.
- Pak Edi: Hasil draft finalnya sudah diterima tanggal 16 Januari 2018 kemudian dicircular. Sebenarnya bukan Sekretariat EITI yang presentasi, tapi konsultan karena dia yang buat. Kemenko telah membuat permintaan data ke Pertamina, namun Pertamina tidak bersedia karena beberapa alasan. Kita tidak bisa memaksa. Jadi awalnya persetujuan hanya untuk minyak saja, namun ternyata ekspor bagian pemerintah kecil. Maka konsultan mengatakan ekspor saja tak signifikan, sehingga konsultan meminta pembukaan data impor juga. Jadi untuk SKK Migas dan Pertamina diharapkan mengomentari rekomendasi, takutnya dianggap setuju dan menjadi final. Karena memang banyak sekali datanya, apabila 1 pengiriman bisa sehari 8 lembar data, kalau setahun bisa 8x365 hari lembar data. Jadi lebih baik bisa 3 pengiriman perbulan, jadi setahun 36 data pengiriman. Namun Pertamina masih keberatan karena kalau menyangkut pihak ketiga harus melalui persetujuan pihak ketiga. Namun rekomendasi dari draft laporan final lebih baik dijawab sebelum menjadi final.
- Presentasi tentang Laporan *Commodity Trading* disampaikan oleh Bpk Doni Erlangga (Sekretariat EITI):
 - Data yang dipublikasikan adalah data ekspor yang telah tersimpan dalam sistem in-house SKK Migas, dikombinasikan dengan informasi lain.
 - Ruang lingkup: Selain lingkup yang tidak termasuk impor, ada hal lain yang membuat cakupan ekspor yang lebih sempit.
 - Harga gas alam cair (LNG) sangat bervariasi. Sejumlah usaha patungan yang

- dilakukan oleh perusahaan minyak internasional, mengoperasikan produk untuk ekspor, namun sebagian besar dikirim ke Indonesia, oleh karena itu akan dianggap sebagai *first trade*.
- Ekspor Pipa Gas: Indonesia mengeksport sejumlah kecil gas melalui jaringan pipa ke Malaysia dan Singapura dari beberapa proyek. Tidak jelas bagaimana mekanismenya. Namun hal ini termasuk *first trade*
 - *Domestic Market Obligation* (DMO): Tidak jelas dari data terkini yang dipasok oleh SKK Migas dimana transaksi yang tercatat mungkin berada di bawah persyaratan DMO. Seringkali, kewajiban DMO dengan pengaturan harga yang berbeda dan diskon dari "harga normal".
 - Pipas Gas Domestik: Penjualan gas dalam negeri sebaiknya masuk dalam laporan
 - Rekomendasi untuk Tim Pelaksana EITI (Ruang Lingkup):
 - a. Instansi terkait (SKK Migas, Pertamina dan Kementerian Keuangan) untuk menyediakan data yang belum ada agar sesuai dengan panduan yang direkomendasikan. Khususnya: invoice, tanda terima barang, tanggal pembayaran, jumlah yang dikonfirmasi, dan nilai tukar yang digunakan.
 - b. Menyediakan data pembayaran ekspor gas alam cair (LNG) yang diterima oleh negara, dan konfirmasi rincian ekspor pipa gas ke Malaysia dan Singapura.
 - Rekomendasi untuk Tim Pelaksana EITI (Proses Informasi):
 - a. ICP: MSG menerbitkan dan menyusun semua prosedur terkait dengan penetapan ICP, seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.
 - b. ICP: Pertamina membuat data historis, untuk memungkinkan perbandingan sistem pembayaran yang diterima oleh Kementerian Keuangan dalam rupiah terhadap harga resmi yang diumumkan.

Tanggapan:

- Pak Edi: Mereka mendapatkan data dari A0, kelihatannya mereka hanya mendapatkan data A0. Sebenarnya laporan dari SKK Migas sudah lengkap sekali dan sudah cukup rinci. Yang disarankan seperti exchange rate, invoice, itu tergantung Bapak/Ibu untuk menjawab bersedia atau tidak. Kemudian untuk ICP sebenarnya sudah ada yang menentukan karena ada komite. Pasti ada hal-hal juga yang tak bisa dibuka juga.
- Pak Bastian: Untuk laporan Commodity Trading perlu kita titikberatkan kepada rekomendasi dan analisis dari konsultan. Rekomendasi seperti Tim Pelaksana menyusun SOP ICP? Apakah memungkinkan. Kalau hanya untuk memberikan usulan masih bisa. Jadi harus kita cermati, karena takutnya malah menjadi beban untuk kita. Jadi apabila ada rekomendasi yang tidak pas silahkan disanggah atau dikomentari.
- Bpk Robbi (DG Anggaran): Takutnya konsultan tak mendapat informasi yang memadai sehingga tak mendapat rekomendasi yang memadai. Seperti penentuan harga ICP, yang tak pas. Seperti penentuan DMO yang diskon, padahal itu berpihak pada pemerintah. Sepertinya itu bukan diskon tapi dituangkan dalam perjanjian, misalnya untuk sumur-sumur yang tua. Misalnya penjualan kenapa harga domestik adalah rupiah. Itu ada argumentasi atau keputusan dari Kemenkeu agar tak ada gejolak harga. Jadi rekomendasinya beberapa agak kurang seperti penentuan ICP yang kita (Tim Pelaksana EITI) tak bisa intervensi.
- Bpk Aryanto: Kalau melihat temuan/rekomendasi seperti Tim Pelaksana harus ikut membuat SOP ICP dll, kita harus melihat regulasinya. Karena kita harus mengubah regulasinya juga. Jadi perlu pendapat dari SKK Migas dan Pertamina. Jadi kalau kita belum bisa memberikan data, paling tidak ada beberapa hal perlu dimasukkan di pelaporan.
- Bpk Alief (Pertamina): data-data yang diminta disesuaikan template tentang impor. Dari data impor ada perjanjian bayar dan ada perjanjian data tak boleh keluar. Jadi Pertamina tak bisa mengeluarkan sesuai template.
- Ibu Runi (SKK Migas): Peraturan di Indonesia tentang cara penentuan minyak mentah atau gas

ada tata caranya di Permen ESDM 32/2012 dan gas di Permen ESDM 6/2016. Dalam Permen disebutkan dengan menentukan berbagai hal seperti keekonomian lapangan, harga gas bumi internasional, dan nilai tambah untuk nasional. Untuk lifting yang bisa kita berikan hanya laporan A0. Untuk template semua kargo, itu banyak sekali karena ada 2000 transaksi. Itu akan banyak sekali, jadi lebih baik sampel.

- Bpk Bastian: Kira-kira apakah SKK Migas sependapat dengan konsultan?
- Bpk Musfadhilah (SKK Migas): Lebih baik penyampaian laporan Commodity Trading dengan penundaan data 24 bulan, sesuai laporan EITI.
- Bpk Doni: Tanggapan diminta disampaikan dalam waktu 1 minggu.
- Bpk Edi: Bisa disampaikan Permen tentang ICP, atau kalau tidak bisa lebih baik ditanggapi.
- Bpk Ronald: Lebih baik usul rekomendasi tak hanya dari SKK Migas atau Pertamina tapi juga yang lain.

3. Pembahasan Scoping Study Laporan EITI 2016

- Presentasi oleh Bpk Edi.
- Sedang disusun Scoping Study 2016, diharapkan akhir Februari ini sudah selesai.
- Dana PNBP telah disusun
- Data per perusahaan (materialitasnya) kalau PNBP di atas 15 M maka total perusahaan 120 perusahaan minerba, kalau 16 M maka total perusahaan 112.
- Tim Pelaksana harus memutuskan, tahun lalu kita memamakai pelaporan untuk 123 perusahaan, namun ada 38 perusahaan yang tak lapor. Jadi database harus diperkuat. Kira-kira yang mana yang mau diambil? Jadi kira-kira mana yang mau diambil
- Pak Bastian: Jadi ini berapa PKB2B, KK sll?
- Pak Edi: Datanya ada
- Bpk Aryanto: Bisa dilihat berapa yang sudah biasa lapor atau tidak. Jadi antara jumlah 112 dan 120 apakah 8 sisanya sudah biasa lapor atau tidak?
- Bpk Edi: Tambahnya kalau IUP takutnya agak susah dikumpulkan datanya. Minimal harus sama tahun kemarin dengan cakupan 93% penerimaan negara dari minerba.
- Bpk Bastian: Yang dikhawatirkan semakin banyak yang diminta lapor, tapi malah nggak melapor. Lebih baik lebih sedikit tapi melapor. Jadi Sekretariat EITI harus mempelajari dulu.
- Ibu Ermy (CSO): Ternyata 93% hanya diwakili 100an perusahaan. Harus dievaluasi yang ribuan perusahaan terhadap PNBP, karena IUP juga banyak yang besar juga kontribusinya.

C. PENUTUP

Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan agar semua keputusan rapat agar ditindaklanjuti.

D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

1. Akan dilakukan persiapan lanjutan untuk menghadapi proses validasi seperti mempersiapkan berbagai dokumen, briefing anggota Tim Pelaksana EITI, dan akan dilaksanakan workshop tentang validasi.
2. Anggota Tim Pelaksana EITI (Terutama SKK Migas dan Pertamina) diharapkan memberikan tanggapan terhadap draft final Laporan Commodity Trading sebelum difinalisasi oleh konsultan. Diharapkan tanggapan dalam waktu 1 minggu.
3. Jumlah entitas pelapor untuk sektor minerba di Laporan EITI 2016 masih akan dibahas lagi apakah dengan batas 115 Miliar pembayar ke PNBP yaitu 120 perusahaan atau 116 Miliar yang berjumlah 112 perusahaan.

